

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan paling bawah di Indonesia. Desa secara langsung memiliki fungsi sebagai tempat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Desa merupakan unit politik yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Desa memiliki hak untuk melaksanakan pesta民主nya. Salah satu wujud demokrasi di tingkat desa adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades merupakan proses demokrasi yang memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin suatu desa untuk kemudian dapat melaksanakan fungsi dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Adanya pilkades memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada Masyarakat desa untuk melakukan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun hak untuk dipilih. Sebagian masyarakat melaksanakan pilkades sebagai pesta demokrasi secara natural untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan memilih para kandidat pilkades, tetapi sebagian masyarakat yang tidak bertanggungjawab terhadap proses demokrasi akan memanfaatkan untuk perjudian. Sehingga dengan itu, keberadaan pilkades dapat menyebabkan munculnya kontestasi sengit diantara para calon kepala desa.

Pemilihan kepala desa yang sebenarnya telah diatur oleh Undang-Undang, pada akhirnya akan sulit terselenggara secara luberjurdil karena adanya permainan kepentingan politik, kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan, dan faktor kebudayaan dalam pilkades. Sesuai pernyataan dalam penelitian tersebut, salah satu faktor utama yang memicu kontestasi sengit dalam Pilkades adalah kepentingan politik lokal. Sehingga dengan itu tidak jarang jika para calon kepala desa dibantu oleh sekelompok orang yang terorganisir sebagai upaya dalam memenangkan mereka dalam proses pelaksanaan pilkades. Dalam hal itu, pendukung dalam lingkup desa biasa disebut dengan “botoh”.

Dalam Bahasa Jawa, kata botoh memiliki arti penyabung ayam atau “pejudi”, namun botoh juga memiliki peran sebagai makelar suara yang bekerja dengan calon kepala desa untuk mendapatkan atau mengubah suara pemilih. Botoh dalam hal ini bekerja dengan dilatarbelakangi oleh keuntungan material bagi pribadi maupun kelompok didalamnya. Keberadaan botoh menjadi titik penting pada kontestasi tersebut karena mereka dapat bertindak sebagai penentu kemenangan dari suara yang mampu mereka kumpulkan.

Botoh dalam Pilkades yang terjadi di Desa Dlimoyo Tahun 2020 merupakan Botoh yang bekerja sebagai pemodal untuk mendanai proses Pilkades kandidat yang diusungnya. Botoh yang dimaksud adalah Botoh dari kandidat nomor 2 yang bernama Saryono. Botoh tersebut bekerja dalam upaya memenangkan Saryono menjadi Kepala Desa Dlimoyo periode 2020-2028. Botoh dan Cakades tersebut memiliki hubungan patron-klien jangka panjang yang saling menguntungkan yaitu Botoh berperan sebagai Patron dengan memberikan

materi kepada Cakades yang diusungnya untuk modal Pilkades dan Cakades tersebut berperan sebagai Klien dari Botoh yang menerima bantuan modal dari Botoh untuk kemudian didistribusikan kepada calon pemilih dalam wujud politik uang. Dalam konteks ini, hubungan Patron-Klien yang terjadi lebih condong untuk memberikan keuntungan bagi para Botoh. Hal tersebut karena materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Botoh kepada Cakades sebagai modal pilkades, nantinya Kades terpilih wajib mengembalikan materi tersebut berupa kemudahan administrasi desa, pemberian (penyewaan tanah bengkok), dan juga keikutsertaan Botoh pada proyek desa. Sehingga dengan ini, Kades terpilih (Saryono) dapat diibaratkan sebagai "Boneka" dari para botoh yang hanya dibantu mendapatkan jabatan Kades yang tidak bisa memengaruhi keberjalanan Pemerintahan Desa Dlimoyo. Hal tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Kades Saryono semata-mata hanya akan mengikuti semua perintah dari botoh meskipun sebenarnya ia memiliki kekuasaan dari jabatan yang telah diperolehnya. Saryono akan dimanfaatkan oleh Botoh untuk mengakses kemudahan dan andil nya pada keberjalanan Pemerintahan Desa Dlimoyo. Salah satu hal yang menjadi bukti kemudahannya adalah akses Botoh untuk menjadikan mantunya sebagai Kepala Dusun Patemon pada Pengangkatan Perangkat Desa Dlimoyo Tahun 2024.

Pembahasan tentang adanya botoh yang melakukan praktik money politic dalam rangka kemenangan calon kandidat pemilu sudah menjadi hal yang biasa. Hasil penelusuran dari berbagai literatur dan telaah penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan judul penelitian "Hubungan Calon Kepala Desa dan

Botoh dalam Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020”. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Agus Machfud Fauzi dengan judul Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada di Indonesia, membahas tentang peran botoh dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa calon yang berhasil memenangkan Pilkada tidak selalu memiliki sumber daya finansial yang kuat, dan terbukti bahwa pelaksanaan pilkada di Jakarta dimenangkan oleh calon yang tidak memiliki modal. Meskipun demikian, mereka mampu meraih dukungan dari botoh yang memainkan peran penting dalam mendanai kampanye mereka. Ini menunjukkan bahwa peran botoh dalam politik lokal memiliki implikasi yang signifikan terhadap hasil pemilihan.

Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Acidieni Hartati., dkk, dengan judul Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018, yang membahas tentang pola kerja botoh dalam *vote buying* di Pemilihan Bupati Kudus 2018. Botoh dalam penelitian tersebut menjadi aktor non electoral informal yang tidak hanya mempengaruhi perilaku politik pemilih tetapi juga mampu mempengaruhi perolehan suara bahkan dapat membalikkan hasil akhir dalam pilkada melalui beberapa pola kerja yang dilakukan oleh botoh. Pola kerja tersebut antara lain murni taruhan, tujuan ekonomi, membentuk mekanisme kemenangan kandidat, dan botoh sebagai pemodal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Halili dengan judul Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto

Sumenep Madura) yang membahas tentang adanya praktik politik uang dalam Pilkades dengan komponen yang terdiri dari pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. Salah satu aktor atau pelaku yang terlibat dalam pilkades tersebut adalah botoh yang menggelontorkan uang untuk calon kepala desa. Mereka mengeluarkan uang untuk memastikan kemenangannya dalam maen, selama masih dalam rasio costs-benefits yang menguntungkan. Keuntungan yang diharapkan dari para botoh adalah dapat dipermudah dalam urusan administrasi desa dan harapan terlibat dalam proyek-proyek desa (pembuatan pmbangunan baru, pengaspalan, dll).

Uraian penelitian terdahulu di atas telah memberikan gambaran persamaan maupun perbedaan dalam penelitian ini dari segi substansi yang dibahas. Penelitian ini tidak hanya fokus pada cara yang dijalankan oleh botoh sebagai pemodal dalam upaya memenangkan kandidat calon kepala desa di Desa Dlimoyo Tahun 2020, tetapi juga membahas tentang adanya praktik klientilesme yang dilakukan pacsa pemilihan kepala desa oleh kandidat terpilih dengan melakukan hubungan timbal balik setelah apa yang dilakukan botoh terhadap kandidat calon kepala desa.

Kontestasi Pilkades berlangsung di Desa Dlimoyo Ngadirejo Temanggung tahun 2020 yang diikuti oleh tiga calon kepala desa. Pada nomor urut 1 adalah Tumari dari Dusun Klesem, nomor urut 2 adalah Saryono dari Dusun Mloyo (calon kades terpilih), nomor urut 3 adalah Dalyanto dari Dusun Klesem (mantan kades sebelumnya). Pilkades dilaksanakan di Balai Desa Dlimoyo yang terletak di Dusun Patemon. Kontestasi berlangsung cukup sengit diantara

tiga calon tersebut, baik sebelum dan saat pelaksanaan pilkades. Diperoleh data jika masing-masing calon kepala desa memiliki kelompok pendukung di beberapa dusun yang ada di Desa Patemon. Saryono sebagai Calon Kades nomor satu yang berhasil menang dalam pilkades memiliki botoh yang tersebar di Dusun Mloyo dan Dusun Patemon, dimana bahwa dua dusun tersebut menjadi harapan untuk menyumbang suara yang banyak karena dua dusun tersebut jika digabungkan sudah cukup untuk memperoleh kemenangan. Botoh yang ada dalam dua dusun tersebut tidaklah botoh yang dibentuk oleh calon kades melainkan botoh yang secara sukarela memberikan dukungannya kepada Saryono dengan bersedia mendanai kegiatan pencalonan seperti dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada setiap warga di dua dusun tersebut. Botoh yang mendukung Saryono merupakan sekelompok orang yang terdiri dari beberapa petani yang kaya dan juga Kyai setempat. Sehingga jika dilihat secara politik, mereka para botoh dari Saryono sebenarnya tidak memiliki kecakapan perpolitikan. Akan tetapi sebagai Masyarakat di desa, mereka hanya akan tunduk kepada orang kaya dan juga ahli agama dalam hal ini ustad atau Kyai. Sehingga meskipun tidak cakap dalam hal politik, mereka mampu untuk memobilisasi suara Masyarakat supaya mendukung Saryono sebagai Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020-2028. Cara yang dilakukan oleh botoh dari cakades yang bernama Saryono yaitu dengan membagikan uang Rp. 50.000/orang menjelang pilkades dan juga saat pelaksanaan pilkades di rumah masing-masing warga. Selain itu, mereka juga menjanjikan kepada para ketua RT di dua dusun untuk memberikan masing-masing dana sebesar Rp. 3.500.000

hingga Rp. 5.000.000 melalui pemberian bengkok kepada masing-masing RT sebesar satu hingga dua kesuk (dengan dikelola sendiri oleh RT dan uang dimasukkan kedalam kas RT).

Penelitian ini tidak hanya fokus pada cara yang dijalankan oleh botoh dalam memenangkan Saryono sebagai kepala desa, melainkan juga membahas terkait dengan kelanjutan hubungan botoh dengan kepala desa terpilih. Hal itu didasarkan dari adanya perjanjian yang dilakukan antara calon kepala desa terpilih bersama dengan botoh untuk memberikan sebagian bengkok kepada botoh dalam rangka mengganti dana pemenangan pemilihan kepala desa kemarin. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pemenangan Saryono dalam pemilihan Kepala Desa Dlimoyo tahun 2020 melakukan praktik klientelisme. Hal itu dibuktikan dengan adanya keberlanjutan hubungan diantara kades terpilih bersama botoh dan Masyarakat di dua dusun setelah pemenangan. Klientelisme merupakan salah satu fenomena yang masih sering terjadi dalam praktik demokrasi di Indonesia terutama dalam konteks kedaerahan seperti di pilkades (Ramadhan, 2019: 169-172).

Klientelisme yang terjadi dalam dusun tersebut karena pasca terpilihnya Saryono menjadi Kades, kemudian membagikan bengkok tersebut kepada setiap RT di Dusun Patemon dengan jumlah 7 RT (kecuali RT 04 yang menolak bengkok tapi menerima uang sejumlah 3 hingga 5 juta) dan Dusun Mloyo dengan jumlah 4 RT. Hal itu dilakukan karena botoh tersebut berhasil melakukan perjanjian dengan para ketua RT di dua dusun tersebut yang

kemudian mereka berhasil mengumpulkan suara banyak dari dua dusun tersebut, sehingga pada akhirnya setiap RT diberi bagian bengkok masing-masing yang kemudian bengkok tersebut di kelola oleh tiap RT untuk disewakan tiap tahunnya dengan uang sewa sejumlah 3 hingga 5 juta rupiah dan uang tersebut masuk kepada kas RT masing-masing. Untuk keuntungan botoh yang lain yaitu mereka memiliki hak untuk melakukan penyewaan tanah bengkok selama yang mereka inginkan, tentunya hal itu sangat menguntungkan bagi para botoh karena mereka tidak takut untuk tidak memiliki lahan sawah karena selama masa jabatan kepala desa terpilih selesai, mereka memiliki sawah yang dapat terus disewa. Tindakan tersebut menunjukkan klientelisme yang kuat terjadi di Masyarakat Desa Dlimoyo terkhusus di Dusun Patemon dan Dusun Mloyo karena adanya praktik uang Gentong Babi yang berkelanjutan tidak hanya melibatkan hubungan botoh dengan kepala desa terpilih, tetapi juga menyertakan politik uang kepada Masyarakat setempat yang bersangkutan.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian pada cara botoh memenangkan Saryono dalam Pilkades yang sebenarnya tidak memiliki modal untuk mengikuti kontestasi pilkades. Hal itu karena terdapat dua kandidat lain yang menurut peneliti lebih berpotensi menang. Kandidat yang kedua bernama Tumari memiliki latar belakang kakak yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Dengan itu Tumari berani menjanjikan kepada warga Dlimoyo jika terpilih menjadi Kepala Desa Dlimoyo periode 2020-2028 maka akan mengusulkan berbagai proposal

kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di Desa Dlimoyo supaya mudah di acc oleh DPRD. Selain itu bersama dengan para botohnya juga melakukan money politik dengan membagikan uang yang lebih besar dibandingkan dengan calon terpilih yaitu sebesar Rp. 150.000/orang yang dilakukan pada hari sebelum pelaksanaan pilkades, serangan fajar, dan juga hari-h pilkades dengan mempersilahkan beberapa warga yang akan datang ke tps untuk dapat masuk ke beberapa rumah warga dekat tps yang dipinjam oleh botoh sebagai tempat makanan untuk sarapan pemilih dengan disertai bujukan dari para botoh supaya dapat merubah suaranya kepada Tumari. Selain itu, kandidat kedua juga telah melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh muslim seperti Kyai di Desa tersebut dan diakhiri dengan menyumbang mimbar masjid di Dusun Patemon sebelum pelaksanaan pilkades.

Peneliti juga berpendapat bahwa kandidat ketiga berpotensi lebih unggul dari kandidat pertama karena latar belakangnya yang sebelumnya telah menjabat sebagai Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2013-2019 (sehingga masyarakat sudah lebih kenal) dan juga latar belakang Pendidikannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya yaitu telah menempuh Stata 1. Bahkan tidak hanya itu, kandidat ketiga juga memiliki saudara yang cukup terpendang di hampir seluruh dusun yang ada di Desa Dlimoyo yang kemungkinan besar dapat memberikan suara kepada kemenangannya secara sukarela dan bahkan mereka bersedia menjadi botoh dari kandidat ketiga dengan merubah suara pemilih kandidat pertama maupun kedua, terlebih kandidat kedua yang sama-sama dari Dusun Klesem dengan memberikan uang

lebih besar kepada masyarakat yaitu Rp. 250.000/orang hingga Rp.300.000/orang dan juga meniru strategi dengan menyediakan sarapan yang telah tersedia makanan gratis yang diterapkan oleh botoh kandidat kedua dengan menu makanan yang berbeda (kandidat kedua dengan lauk utama daging ayam dan kandidat ketiga dengan lauk utama daging sapi). Hal itu ditujukan supaya mereka yang sudah masuk ke makanan gratis kandidat kedua dapat kemudian masuk lagi ke makanan gratis kandidat ketiga dan akhirnya botoh kandidat ketiga dapat merubah suara pemilih untuk kemudian di tujukan kepada kandidat ketiga. Namun demikian, pada pelaksanaan pilkades, Saryono berhasil membuktikan kemampuannya dalam berkompetisi dengan dua kandidat yang berdasarkan data memiliki potensi lebih unggul untuk menang. Kemenangan yang diperoleh Saryono merupakan keberhasilan botoh dalam melakukan mobilisasi suara dengan berbagai cara yang telah dijelaskan dalam paragraph sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Calon Kepala Desa dan Botoh dalam Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020”. Penelitian dilakukan menggunakan dua data yang terdiri dari data primer melalui wawancara dan dokumentasi kepada para botoh dari Saryono yang tersebar di Dusun Mloyo dan Dusun Patemon serta kepada beberapa masyarakat yang ikut serta dalam mengikuti pilkades dengan menggunakan data sekunder berupa arsip dokumen dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang cara botoh dalam

memenangkan calon kepala desa nomor urut 2 pada pilkades di Desa Dlimoyo Tahun 2020.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara botoh dalam memenangkan calon kepala desa pada proses pemilihan Kepala Desa di Desa Dlimoyo Tahun 2020?
2. Bagaimana klientelisme yang terjadi dan kelanjutan hubungan antara kepala desa terpilih, botoh, dan masyarakat pada proses pemilihan Kepala Desa di Desa Dlimoyo Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis cara botoh dalam memberikan kemenangan calon kepala desa di Desa Dlimoyo Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis klientelisme yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dan kelanjutan hubungan botoh dan Masyarakat dengan kepala desa terpilih setelah selesainya proses pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang teori politik lokal, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa. Hasil penelitian diharapkan mampu membantu mengembangkan pemahaman tentang cara "botoh" dalam memenangkan calon kepala desa serta hubungan botoh bersama masyarakat dengan kepala desa terpilih setelah selesainya proses pemilihan kepala desa.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi pengembangan konsep "botoh" dalam konteks politik desa. Hal ini dapat memberikan informasi baru tentang aktor-aktor yang memengaruhi politik desa dan cara mereka berinteraksi dalam pemilihan kepala desa.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengalaman langsung penulis tentang cara botoh dalam memenangkan kandidat yang didukung dalam pemilihan kepala desa.
- b. Memberikan gambaran mengenai kelanjutan hubungan antara kandidat terpilih dengan botoh dan masyarakat.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Dalam topik “Hubungan Calon Kepala Desa dan Botoh dalam Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020” tidak terdapat penelitian yang secara spesifik sama membahas topik ini. Namun topik ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti pada aspek cara, peran, maupun strategi yang dilakukan oleh botoh atau dalam nama lainnya sebagai upaya pemenangan pemilu (pilkada dan pilkades). Penelitian-penelitian tersebut memiliki beragam subjek yang berbeda, tetapi tetap bersinggungan dengan topik penelitian pada proposal skripsi ini.

Penelitian pertama yang penulis ambil sebagai gambaran dan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada di Indonesia” (Fauzi, 2017). Dalam penelitian tersebut, peneliti membahas tentang peran yang dilakukan oleh botoh dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Botoh dalam penelitian tersebut merupakan botoh yang berperan sebagai pemodal dalam memenangkan salah satu kandidat pilkada. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada DKI tahun 2017 dimenangkan oleh calon yang tidak dikehendaki pemilik modal.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Agus Machfud, peneliti juga menggunakan jurnal penelitian yang berjudul “Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018” (Hartati., dkk, 2019). Penelitian tersebut membahas tentang pola kerja botoh dalam *vote buying* (memberi uang kepada pemilih secara langsung atau dengan

membelikan rokok) di pemilihan bupati kudus 2018. Botoh dalam penelitian tersebut menjadi aktor non electoral informal yang tidak hanya mempengaruhi perilaku politik pemilih tetapi juga mampu mempengaruhi perolehan suara bahkan dapat membalikkan hasil akhir dalam pilkada melalui beberapa pola kerja yang dilakukan oleh botoh. Pola kerja tersebut antara lain murni taruhan, tujuan ekonomi, membentuk mekanisme kemenangan kandidat, dan botoh pemodal. Botoh pada penelitian ini menggunakan strategi survei yang bersifat kearifan lokal (local wisdom). Mereka menggunakan budaya jagongan untuk memperoleh informasi mengenai kecondongan suara pemilih di wilayah yang dia tangani untuk kemudian dapat mereka analisis terkait dengan proyeksi lahan yang mereka kelola mengenai para pemilih yang cenderung memberikan suaranya kepada lawan.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Acidieni Hartati, dkk, peneliti juga menggunakan jurnal penelitian yang berjudul “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)” (Halili, 2009). Penelitian karya Halili ini terfokus pada pola praktik uang dalam pilkades di Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura dan juga analisisnya terhadap partisipasi politik dalam pilkades di desa tersebut. Penelitian tersebut merupakan teknik kualitatif-deskriptif dengan pendekatan naturalistic. Dalam penelitian ini dihasilkan beberapa temuan berupa adanya pola praktik uang yang terdiri dari komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. Botoh pada penelitian tersebut merupakan aktor yang menggelontorkan uang untuk calon kepala desa. Mereka

mengeluarkan uang untuk memastikan kemenangannya dalam maen selama masih dalam rasio costs-benefits yang menguntungkanannya. Mereka melakukannya dengan alasan supaya dipermudahkan dalam urusan administrasi desa dan harapan terlibat dalam proyek-proyek desa (pembuatan baru, pengaspalan, dll).

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian yang berjudul “Matinya Mesin Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Syahri Mulyo Dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2013)” (Hergianasari, 2017). Penelitian ini membahas lebih jauh mengenai peran yang dilakukan oleh botoh dalam kemenangan Pilkada Kabupaten Tulungagung 2013. Botoh pada Pilkada tersebut merupakan instrument mobilisasi non partai yang berhasil memobilisasi massa dalam kemenangan Syahri Mulyo dengan cara memberikan modal kepada kandidat berupa uang dalam rangka mensukseskan kegiatan pencalonan kandidat yang di jagokan atau dengan cara yang disebut “ngapit” yaitu menawarkan dirinya untuk memberikan modal pilkada namun setelah berhasil menang mengembalikan biaya pilkada 1 kali lipat dari yang sudah dikeluarkan dan botoh tersebut akan membayar lawannya yang menang dua kali lipat dari biaya yang di pertaruhkan.

Botoh pada penelitian tersebut sebelumnya sudah memiliki hubungan pribadi dengan calon sehingga bukan sebagai botoh pragmatis bermain judi semata-mata untuk memperoleh kemenangan Pilkada. Tetapi mereka bertujuan untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal tersebut, botoh dapat bekerja untuk memberikan

informasi wilayah swing voters ke timnya sehingga dengan itu mereka dapat memetakan kekuatan dukungan di setiap desa. Sehingga dengan itu, Syahri Mulyo cukup menggunakan atau mendengarkan masukan dari botoh dalam merancang kampanye dan tidak menggunakan jasa konsultan pilkada. Hal itu dilakukan karena botoh tersebut cukup memiliki modal kapital yang besar dan juga modal sosial yang kuat karena mereka sebelumnya juga telah sering menjadi botoh dalam tingkat pemilihan kepala desa di daerah tersebut dan dengan itu mereka sudah cukup mengenal medan serta sudah dikenal oleh Masyarakat setempat. Sehingga dengan itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil penelitian berupa ketergantungan calon pada ketokohan lebih kuat daripada calon yang mengandalkan kekuatan organisasi partai sebagai institusi yang mendukung pencalonannya. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan botoh dalam memenangkan kandidat yang dijagokan dengan memberikan modal yang dimilikinya dalam proses pilkada tersebut. Namun setelah mereka berhasil memenangkannya, maka harus ada imbalan yang dibayarkan dengan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.

Beberapa penelitian yang sudah disebutkan diatas merupakan penelitian yang dianggap peneliti dapat membantu proses pembuatan penelitian ini. Masing-masing penelitian terdahulu saling memberikan informasi dan juga ilmu yang peneliti butuhkan guna menghasilkan tulisan yang baik dan bermanfaat. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berangkat dari hal yang sama, yakni tentang botoh yang terjadi dalam pemilu baik di tingkat pilkades maupun pilkada, namun

terlihat bahwa masih minim penelitian yang membahas mengenai botoh dalam pilkades serta kelanjutan hubungan kepala desa terpilih bersama dengan para botoh dan juga Masyarakat desa, yaitu di Desa Dlimoyo. Penelitian ini akan memperkaya kajian mengenai peran botoh sebagai pemodal dalam pilkades yang berhasil memenangkan kandidat yang di jagokan serta pembahasan tentang adanya praktek klientelisme pasca kemenangan yang ikut menyertakan masyarakat beberapa dusun yang ada di desa tersebut atau dapat disebut dengan praktik uang Gentong Babi. Klientelisme diartikan sebagai transaksi antara politisi dan warga dimana terdapat imbalan materi atas dukungan politik dalam pemilu. James Scott dalam Munro (2010) mendefinisikan klientelisme sebagai mekanisme persahabatan dimana individu dengan status sosial ekonomi yang tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya dengan memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah statusnya (klien), yang sebagai bagian dari patron memberikan dukungan dan jasa kepada klien. Maka dengan pernyataan tersebut, penelitian ini juga berupaya untuk melihat bagaimana cara botoh dalam memenangkan calon kepala desa pada proses pemilihan Kepala Desa di Desa Dlimoyo Tahun 2019.

1.5.2. Klientelisme

Menurut Aspinall & Berenschot (2019: 2) Klientelisme politik merupakan kondisi yang terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye, atau aktor lain menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan maupun manfaat material. Para politisi tersebut

menggunakan metode klientilistik untuk memenangkan pemilihan dengan berupaya membagi-bagikan bantuan seperti uang dan barang kepada pemilih secara individu maupun berkelompok. Cara yang mereka lakukan ditujukan untuk mendapatkan imbalan dari masyarakat berupa suara untuk para politisi tersebut.

Hutchcroft dalam Aspinall & Sukmajati (2015) menjelaskan bahwa klientelisme merupakan karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientelisme juga diartikan sebagai relasi kekuasaan personalistik dan keuntungan material yang dipertukarkan dengan dukungan politik. Dalam hal tersebut, relasi klientilistik merupakan relasi tatap muka secara langsung atau *face to face* yang pelaksanaannya memiliki hubungan transaksional berlanjut.

Sesuai dengan pernyataan diatas, maka klientelisme dapat diartikan sebagai hubungan Kerjasama dalam waktu lama yang saling menguntungkan antara seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya dengan memberikan perlindungan atau keuntungan maupun keduanya kepada orang yang lebih rendah statusnya (klien), dimana sebagai bagian dari patron memberikan dukungan dan jasa kepada klien. Klientelisme yang dimaksud pada penelitian dengan judul “Hubungan Calon Kepala Desa dan Botoh dalam Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020” merupakan hubungan jangka panjang yang dilakukan oleh Botoh dengan calon kepala desa yang bernama Saryono. Dimana hubungan tersebut terjadi ketika Pemilihan Kepala Desa

Dlimoyo 2020 berlangsung. Hubungan diantara Botoh dan calon kepala desa tersebut dapat di klasifikasikan dimana Botoh dalam hal ini berperan sebagai Patron yaitu dengan memberikan modal kepada calon kepala desa pra-pilkades hingga pada hari-h pilkades. Calon kepala desa merupakan klien dari Botoh dengan pemberian berupa materi dari Botoh sebagai modal untuk ikut serta pada kontestasi Pilkades Desa Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020. Maka dengan ini, terlihat bahwa terdapat klientelisme yang terjadi dalam pemilihan kepala desa yang melibatkan hubungan antara Botoh dan Calon Kepala Desa dengan penjelasan bahwa Botoh berperan sebagai Patron dan calon kepala desa sebagai klien. Botoh yang berperan sebagai Patron dari Calon Kepala Desa Dlimoyo yang bernama Saryono (nomor urut 2), merupakan Botoh yang terbentuk secara mendadak pada saat Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung 2020 berlangsung. Botoh tersebut terbentuk untuk memberikan modalnya kepada Calon Kepala Desa supaya menang pada kontestasi pilkades. Botoh tersebut pada mulanya mengusung Saryono maju pada Pemilihan Kepala Desa karena mengetahui bahwa warga Dusun Mloyo akan memberikan suaranya secara menyeluruh kepada kandidat yang berasal dari dusunnya, hal itu diakibatkan dari rasa tidak puas mereka kepada Kepala Desa Sebelumnya yang menurut mereka belum mampu memberikan rasa adil bagi Dusun Mloyo karena kebanyakan dana bantuan maupun proyek-proyek kebanyakan melibatkan masyarakat dari Dusun Klesem yang merupakan dusun asal Kepala Desa Dlimoyo periode sebelumnya. Sehingga dengan itu, Botoh mengusung Saryono menjadi Calon Kepala Desa karena dengan latar

belakang Saryono yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Perangkat Desa Dlimoyo dan juga pandangan bahwa Saryono mudah untuk disetir oleh para Botoh yang mengusungnya untuk memberikan keuntungan kepada mereka karena anggapan bahwa Saryono merupakan sosok yang tidak paham terhadap politik lokal karena latar belakang pendidikannya yang rendah yaitu tamat Sekolah Dasar (berbeda dengan kandidat lain yang tamat SMA dan S1), meskipun dengan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya Saryono merupakan sosok yang disukai oleh warga di Dusun Mloyo karena sikap ramah yang ia miliki. Sehingga dengan ini, masyarakat Dusun Mloyo menghendaki dan akan memberikan suaranya kepada Saryono ketika Pilakdes berlangsung, hal itu terbukti bahwa suara Saryono tinggi di Dusun Mloyo dan yang kedua di Dusun Patemon. Faktor perilaku lah yang membantu Saryono untuk dapat maju menjadi cakades selain bantuan dari Botoh yang mengusungnya (sesuai dengan teori

Dengan kata lain, bahwasanya Botoh dan Calon Kepala Desa tersebut pada mulanya tidak memiliki hubungan yang dekat satu sama lain baik dari kekerabatan maupun dari aktor kepentingan lainnya. Akan tetapi, Botoh yang kemudian mengusung Saryono untuk dapat menang pada Pilkades di Desa Dlimoyo Tahun 2020 ini merupakan Botoh yang terdiri dari Petani Kaya dan Kyai di desa setempat yang kemudian memiliki tujuan bagi kepentingan mereka dalam hal dipermudah pada urusan administrasi desa ataupun mengisi jabatan perangkat desa (hal itu dibuktikan bahwa pada bulan Januari 2024, terdapat mantu dari Botoh Saryono (bernama Fa'i Sarofan) yang kemudian

terpilih menjadi Kepala Dusun di Dusun Patemon Desa Dlimoyo sebagai imbalan yang diberikan oleh Saryono sebagai kepala desa kepada Botoh yang pada saat pilkades berlangsung mampu memberikan materi dan jasanya hingga memenangkan Saryono menjadi Kepala Desa Dlimoyo 2019) yang mana pada penelitian ini Dusun tersebut menjadi penyumbang suara terbanyak kedua setelah Dusun Mloyo yang menunjukkan bahwa Botoh dan Tim Botoh yang terdapat di Dusun tersebut berhasil mengakomodir suara warga untuk dapat memilih Saryono sebagai kepala desa. Selain dipermudah pada urusan desa, Botoh tersebut juga diberi keuntungan untuk penyewaan tanah bengkok yang dimiliki kepala desa hingga waktu selesai masa jabatan Saryono. Bahkan tidak hanya Botoh saja yang diberi akses kemudahan, tim botoh dan juga beberapa masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh kemenangan kepada Saryono yang terdapat di dua dusun tersebut juga diberi sewa tanah bengkok.

Dari pernyataan diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada masyarakat pada dasarnya tidak serta merta merupakan tindakan yang cuma-cuma, akan tetapi tindakan yang memiliki kepentingan terselubung dalam rangka meraup suara rakyat dalam kontestasi pemilu. Keberadaan botoh dalam posisi ini dapat mencampur-adukkan politik lokal (patronase) dengan politik nasional (demokrasi) sebagai basis memperoleh dukungan massa. Oleh karena botoh memanfaatkan adat, budaya, dan agama, maka pemberian materi dan non-materi sebagai perekat relasi patron-klien dianggap hal yang wajar.

Aspinall & Berenschot (2019) menjelaskan bahwa klientelisme politik yang terjadi di Indonesia merupakan klientelisme distingtif. Hal itu karena

klientelisme di Indonesia tidak hanya memarginalkan peran partai politik dalam perpolitikan yang ada, tetapi juga membentuk organisasi non-partai untuk menjaring suara yang kemudian dikenal dengan “tim sukses” yang bergantung pada tokoh atau pemuka masyarakat dan para warga yang tidak terafiliasi dengan partai. Dalam hal tokoh, maka terlihat bahwa politik klientilistik merefleksikan adanya dominasi elite ekonomi yang kemudian masuk ke arena politik dengan distribusi klientilistiknya berupa uang maupun barang sebagai kunci menuju kesuksesan politik yaitu upaya memenangkan pemilu dan kemudian dapat mengakses sumber-sumber daya negara yang lebih besar untuk menumpuk keuntungan ekonomi pribadi atau kelompoknya.

Muhtadi (2013: 43) membagi klientelisme menjadi tiga aliran. Aliran yang pertama adalah aliran determinis yang paralel dengan teori. Aliran kedua adalah klientelisme sebagai bagian dari kebudayaan. Kemudian aliran ketiga adalah klientelisme yang disebarkan oleh institusi politik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa klientelisme terjadi karena adanya hubungan antara patron dan klien yang disebabkan oleh adanya penawaran dan permintaan dari pihak patron (pemilik sumber daya) dan klien (pihak yang tidak berdaya) dengan hubungan yang cukup lama. Pernyataan Muhtadi (2019: 176) yang menyatakan bahwa konsep Klientelisme merupakan pembahasan tentang adanya hubungan patron-klien dan merupakan bagian dari kebudayaan yang disebarkan oleh institusi partai politik. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Klientelisme yang dikemukakan oleh Aspinall & Berenschot (2019:77) menyebutkan bahwa klientelisme merupakan konsep yang sudah membudaya

di politik Indonesia. Kajian klientelisme yang disampaikan oleh Aspinall & Berenschot tersebut membuktikan bahwa klientelisme merupakan suatu konsep politik yang dilakukan oleh patron-klien akibat adanya budaya seperti budaya rasa hormat dan terima kasih yang terasosiasi dari klientelisme yang kemudian menjadikan klientelisme tersebut semakin intens.

Klientelisme pada penelitian ini terjadi pada cara yang dilakukan oleh botoh untuk pemenangan calon Kepala Desa Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020. Klientelisme oleh patron digunakan untuk menghegemoni masyarakat melalui pemberian untuk pertukaran suara (Widyanti; 2020: 28). Penelitian ini menggunakan Klientelisme Aspinall & Berenschot serta Klientelisme Aspinall & Sukmajati berfokus pada terjadinya tindakan klientelisme antar aktor patron dan klien dalam pilkades tersebut yaitu Botoh sebagai Patron dan calon kepala desa sebagai klien, karena dalam hubungan ini Botoh hadir untuk memberikan modal materi berupa uang dan barang kepada calon kepala desa pada proses pemilihan kepala desa berlangsung. Kemudian juga melihat calon kepala desa sebagai patron dan Botoh sebagai klien, hal itu terjadi karena pada waktu pemilihan maka Botoh juga merupakan pemilih yang kemudian memberikan suaranya kepada calon kepala desa atas apa yang telah diberikan berupa janji pemberian tanah bengkok. Selanjutnya hubungan antara calon kepala desa sebagai patron dengan calon pemilih sebagai klien, hal ini karena calon kepala desa memberikan materi kepada calon pemilih dan calon pemilih akan memberikan suaranya kepada calon kepala desa, singkatnya hubungan ini merupakan hubungan yang membahas tentang timbal balik dari

klien kepada patron dengan pemberian suara yang dimilikinya. Selain membahas hubungan antara botoh, calon kepala desa dan masyarakat, penelitian ini juga membahas tentang berbagai cara pemenangan yang dilakukan oleh botoh dari salah satu kandidat calon kepala desa pada pilkades.

Penelitian ini secara umum akan membahas tentang hubungan antara botoh, kepala desa terpilih, dan masyarakat pasca pemilihan dengan membagikan bengkok yang diperoleh kepala desa kepada botoh (sebagai penyewa tetap) dan kepada masing-masing RT untuk dapat disewakan dan uangnya dimasukkan kedalam kas RT. Klientelisme yang terjadi pada pilkades ini sesuai dengan Klientelisme Aspinall dan Berenschot (2019:77) karena seseorang yang berdaya akan mempengaruhi orang yang tidak berdaya yaitu dalam hal ini calon kepala desa akan mempengaruhi masyarakat dan juga calon kepala desa akan dipengaruhi oleh botoh (dari materi yang dimiliki botoh dan diberikan untuk proses pilkades). Dalam hal ini, posisi yang dimiliki oleh botoh dan calon kepala desa tidak selalu menjadi patron. Hal itu karena adanya kondisi yang mengharuskan botoh menjadi klien yaitu ketika pemilihan berlangsung dan calon kepala desa menjadi klien ketika pra-pilkades karena calon kepala desa tersebut merupakan orang yang diberi materi oleh botoh.

Secara lebih lanjut, Botoh dalam hal ini bekerja sebagai perantara penyedia dukungan material maupun non-material yang digunakan sebagai modal untuk mencalonkan jagonya sebagai kepala desa yang kemudian didistribusikan kepada beberapa masyarakat (Klien) dengan berbagai cara distribusi politik uang. Pada penelitian ini, calon kepala desa yang dijagokan

merupakan Klien yang dibantu oleh perantara atau Botoh dengan modal yang dimiliki Botoh tersebut. Calon Kepala Desa yang terpilih diharapkan dapat mengembalikan modal yang telah diberikan Botoh (karena posisinya sebagai Patron) dalam pemenangannya berupa pemberian bantuan maupun manfaat material pra-pilkades seperti pemberian hak penyewaan tanah bengkok selama masa jabatan kepala desa terpilih (Saryono) selesai dan kemudahan dalam akses pelayanan administrasi desa maupun akses keluarga botoh untuk dapat mengisi jabatan menjadi perangkat desa, serta kepentingan lainnya.

1.5.3. Politik Uang dalam Pilkades

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015: 7), Politik Uang merupakan praktik yang membahas tentang distribusi uang (uang tunai maupun barang) dari kandidat kepada pemilih pada saat pemilu. Politik Uang ada karena dibentuk melalui Klientelisme. Politik uang merupakan wujud nyata patronase sebagai alat transaksi dalam berpolitik, baik di kancah pemilihan umum hingga pada pemilihan kepala desa. Hal itu karena politik uang dapat digunakan untuk membeli maupun merubah loyalitas pemilih terhadap calon yang diyakini sebelumnya dari berbagai faktor: misalnya memilih calon kepala desa dari dusun yang sama, dari pendekatan keagamaan karena calon tersebut dipandang ahli agama, dari faktor sosial calon yang dianggap memiliki perilaku baik dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Para calon yang dibantu oleh botoh atau sebutan lainnya akan mendistribusikan uang tunai atau barang kepada masyarakat dalam memperoleh suara. Dengan hal itu, kondisi yang mungkin terjadi adalah politik uang mampu merubah maupun merusak sumber suara

dari pemilih yang pada mulanya diikat oleh faktor-faktor tertentu yang telah mereka yakini sebelumnya (Aspinall & Sukmajati; 2015: 397).

Menurut Halili (2009: 102) praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan realitas sosial dan politik yang memiliki pola (pattern). Dalam prosedur politik dan demokrasi, praktik politik uang berlangsung sebagai sebuah “kebiasaan” dan kewajaran yang sudah mengakar sejak lama. Pola politik uang dalam Pilkades bisa didekati secara objektif melalui berbagai komponen, seperti pada komponen pelaku, strategi ataupun cara, dan sistem nilai yang menggerakkannya (Halili; 2019: 93). Aktor dari praktik politik uang dapat dikategorikan menjadi dua bagian; yaitu pelaku langsung (direct actor) dan pelaku tidak langsung (indirect actor). Pelaku langsung politik uang dalam Pilkades terdiri dari Tim Sukses Calon Kepala Desa dan Bandar judi. Sedangkan pelaku tidak langsung terdiri dari Calon Kepala Desa dan juga Bandar/Pemain judi itu sendiri. Para pelaku tersebut tentunya melakukan berbagai cara maupun strategi dalam rangka memperoleh dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) cara yang dilakukan tersebut terdiri dari beberapa bentuk yang disebut dengan bentuk-bentuk Politik Uang. Bentuk politik uang yang sering terjadi di pemilu diantaranya:

- 1) Pemberian Suara (*Vote Buying*)

Vote Buying merupakan pemberian imbalan materi berupa bentuk uang maupun barang kepada personal atau kelompok pada proses menjelang dilaksanakannya pemilihan atau beberapa hari sebelum pemungutan suara.

Hal itu merupakan strategi yang sering digunakan untuk memperoleh suara dalam kemenangan pemilihan umum hingga pemilihan kepala desa.

2) Pemberian Pribadi (*Individual Gift*)

Bentuk individual gift merupakan pemberian barang atau uang pribadinya secara langsung kepada calon pemilih. Pemberian tersebut dapat berupa makanan dan minuman (bingkisan atau makan bersama). Pemberian individual gift ini sering dianggap hal lumrah oleh masyarakat menjelang masa pemilihan dan bahkan bisa terjadi ketika hari-h pemilihan.

3) Pelayanan dan Aktivitas (*service and activities*)

Pelayanan dan Aktivitas merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kandidat yang dibantu oleh Timses maupun Botoh kepada calon pemilih dalam upaya memperoleh simpati dari mereka. Cara yang dilakukan dalam hal ini seringkali dengan menyediakan atau memberikan dukungan biaya untuk berbagai aktivitas dan pelayanan kepada masyarakat atas kegiatan atau aktivitas tertentu seperti pemberian mimbar masjid.

4) Pemberian Kelompok (*club goods*)

Pemberian Kelompok merupakan praktik politik uang yang diberikan kepada kelompok sosial tertentu yang ada di daerah sasaran tersebut. Dengan banyaknya jumlah komunitas atau organisasi yang berada pada level akar rumput, menjadi sasaran empuk para kandidat dalam mendapatkan suara secara kolektif. Biasanya kegiatan ini dibarengi dengan persetujuan dari tokoh masyarakat setempat, sehingga nantinya kegiatan ini

tidak sia-sia dan bisa menjangkau beberapa kelompok masyarakat sekaligus.

5) Jual Beli suara (*vote trading*)

Vote Trading merupakan cara yang dilakukan apabila cara-cara seperti vote buying, individual gift, club goods, masih kurang memuaskan. Maka dengan itu para botoh yang terafiliasi dalam rangka mendukung jagonya akan mencari jalur alternatif untuk memperoleh suara lebih dengan memberikan uang ataupun barang kepada mereka calon pemilih dari kandidat lain dengan harapan mereka dapat merubah suara kepada kandidat ini atau setidaknya dapat merusak suara karena calon pemilih tersebut tidak datang ke TPS.

6) Proyek Gentong Babi

Proyek Gentong Babi memiliki pengertian sebagai upaya penggunaan anggaran atau fasilitas public dengan tujuan mendapatkan keuntungan politik pribadi (dukungan dengan memperoleh suara rakyat). Proyek ini telah terjadi di ranah Pilkades dengan bukti adanya janji dari calon kandidat untuk memberikan fasilitas yang dimiliki oleh desa (bengkok) untuk kemudian menjadi taruhan dalam ajang pemilihan kepala desa yang nantinya apabila terpilih maka bengkok tersebut akan disewakan oleh mereka para botoh dan kelompoknya selama selesainya jabatan kepala desa.

Dalam memberikan kepastian distribusi materi yang bersumber dari pribadi maupun Botoh secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dituju, maka dilakukanlah cara tertentu oleh kandidat dalam melancarkan aksinya seperti membentuk jaringan yang dipimpin Botoh dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang kemudian semuanya akan membentuk menjadi jaringan lokal untuk mampu lebih dekat dengan calon pemilih. Hal itu karena keterlibatan mereka sangat penting sebagai orang yang menghubungkan kandidat dengan pemilih untuk memperoleh ataupun merusak suara dari lawan secara terstruktur dengan harapan kemenangan dapat diperoleh.

Politik Uang dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang berbagai cara yang dilakukan oleh Botoh sebagai tim pemenangan calon kepala desa yang mendanai modal pilkades dan juga membentuk jaringan dibawah botoh untuk mendekati masyarakat secara langsung. Dimana terlihat bahwa cara yang dilakukan oleh Botoh pada penelitian ini yaitu menggunakan beberapa cara diantara dengan Vote Buying yang terbukti dari adanya pemberian uang dari Botoh kepada para calon pemilih sebesar Rp. 50.000. Kemudian cara yang kedua dengan pengucapan janji (dan terbukti dilakukan) untuk memberikan bengkak kepada setiap RT yang ada di dua dusun, dimana pembagian tersebut memberikan keuntungan secara kelompok dari setiap anggota RT karena adanya modal yang masuk setiap tahunnya sebesar Rp. 3.500.000 hingga Rp. 5.000.000 dari bengkak yang diberikan oleh Saryono (kandidat yang dijagokan dan kemudian menang) sebagai kepala desa terpilih.

Kemudian yang ketiga merupakan cara Politik Gentong Babi sebagai kelanjutan dari cara kedua karena masyarakat secara luas sudah diikutsertakan dalam hal pemberian atau penyewaan bengkok oleh Saryono sebagai kepala desa terpilih, dimana hal itu memiliki kemungkinan besar meningkatkan elektabilitas Saryono di mata masyarakat dengan harapan terpilih kembali pada pencalonan yang akan datang.

Apabila dilihat secara mendalam, maka Politik Uang dalam pemilihan kepala desa yang terlaksana menjadi hal yang lumrah karena pada dasarnya Politik Uang terbentuk atau terjadi diakibatkan oleh adanya Klientelisme yaitu hubungan jangka Panjang yang saling menguntungkan karena adanya kepentingan tertentu antara Patron dan Klien. Dimana dengan adanya Klientelisme tersebut, pihak Patron akan melakukan tindakan distribusi materi kepada Klien yang secara nyata disebut dengan Patronase.

1.5.4. Pilkades Klientilistik

Pada hakikatnya, budaya masyarakat pedesaan di Indonesia tidak dapat digeneralisasikan secara mendasar. Hal ini karena adanya keberagaman suku, agama, dan ras masyarakat. Dimana dengan keberagaman tersebut akan mengakibatkan perbedaan pandangan dari masing-masing individu meskipun berada pada wilayah yang sama. Begitu pula dengan keadaan masyarakat Jawa yang kini sering digolongkan oleh para peneliti menjadi dua kelompok yaitu komunitas petani dan komunitas pesisir (James; 1993: 2). Corak utama masyarakat petani adalah karakter dasar yang sangat mengedepankan tradisi-tradisi leluhur (dalam hal ini konteksnya adalah kebudayaan Jawa). Kemudian

kelompok yang kedua adalah masyarakat pesisir. Kelas ini lebih dikenal sebagai masyarakat dengan karakter yang cenderung keras. Ketersediaan sumberdaya yang condong pada kemaritiman mengakibatkan kontrol sosial yang terjadi dalam tatanan masyarakat lebih cenderung dinamis. Hal itu diakibatkan dengan aktivitas melaut yang mengharuskan mereka jauh dari rumah. Namun demikian bukan berarti masyarakat pesisir lebih tidak menerima perubahan dibandingkan masyarakat pertanian.

Pada intinya, masyarakat Jawa memiliki pola politik aliran lama yang digambarkan dengan keberadaan golongan Priyayi, Santri, dan Abangan (Shoni; 2021: 46). Ketiga kelompok tersebut mewakili masing-masing golongan modernis, golongan religious tradisional dan golongan nasionalis. Pendapat ini kemudian mengalami pergeseran yang signifikan, terlebih dalam konteks keberpihakan masyarakat dalam politik. Beberapa kasus money politik yang mulai marak terjadi, dipahami penulis sebagai salah satu indikator makin mudarnya politik aliran dalam masyarakat Jawa. Hal itu diakibatkan oleh semakin berkembangnya akses teknologi informasi di pedesaan terhadap pemahaman proses politik. Akan tetapi, perkembangan globalisasi dan modernisasi di pedesaan ternyata tidak merubah struktur patron-klien yang terjadi pada ajang pemilihan kepala desa. Pola-pola hubungan sosial dan ekonomi di pedesaan masih kental dengan budaya klientelismenya.

Budaya politik sesuai dengan penjelasan Aspinall & Berenschot (2019: 41) merupakan penggunaan logika dan norma kultural yang dapat membuat orang terlibat dalam pertukaran Klientelisme sebagai pola-pola

husus orientasi tindakan politik. Hal ini berarti bahwa budaya politik merupakan sekumpulan produk budaya yang nantinya dapat berpengaruh terhadap pilihan tindakan politik dari seseorang atau sekumpulan masyarakat. Budaya politik dapat dilihat dari keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam proses politik desa. Tidak hanya keikutsertaan atau partisipasi, namun latar belakang partisipasi masyarakat pedesaan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi, kepercayaan, serta pola-pola hubungan masyarakat itulah yang sangat menentukan budaya politik di pedesaan.

Kompleksitas desa yang menjadi lokasi penelitian ini bertipe masyarakat petani dengan sudah adanya perubahan maupun perkembangan yang kemudian menjadi identitas baru sebuah desa pada umumnya. Meskipun demikian, pola pemilihan kepala desa yang terjadi dalam penelitian ini masih saja menggunakan pola lama yang kental yaitu adanya klientelistik pilkades yang dilakukan antara patron dan klien dalam jangka yang Panjang dan juga secara nyata dilakukan dengan patronase dalam wujud politik uang. Hal ini memberikan gambaran bahwa perkembangan teknologi yang merambah ke arena pemilihan kepala desa, susah untuk kemudian desa itu hanya menggunakan perkembangan teknologi dalam meraup suara calon pemilih (seperti contoh dengan menunjukkan citra baiknya di media sosial). Dalam penelitian ini, klientelisme yang terjadi dalam arena pilkades memberikan pengaruh yang sangat besar karena para patron yaitu Botoh dari kandidat yang dijagokan (Saryono) dalam Pemilihan Kepala Desa memberikan materi secara keseluruhan dalam rangka memenangkan jagonya dan itu terbukti berhasil.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka melakukan berbagai cara dengan membagikan materi berupa uang dan barang yang dimilikinya serta berhasilnya mereka mendapatkan kepercayaan dari tokoh masyarakat seperti dari ketua RT untuk kemudian memobilisasi masa dari anggota masing-masing RT.

Maka dengan itu dapat dikatakan bahwa proses yang dilakukan oleh kandidat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Dlimoyo pada Tahun 2020 masih menggunakan bantuan dari aktor informal yaitu Botoh desa yang bersedia memberikan materi dalam proses menuju kemenangan pilkades yang kemudian modal tersebut akan dikembalikan oleh kandidat terpilih menggunakan bengkok yang diperolehnya. Selain itu, sesuai dengan pernyataan dari Halili (2009: 106) bahwa kondisi ini akan melahirkan yang disebut Larry Diamond sebagai demokrasi semu (*Pseudo Democracy*) yaitu keberadaan mekanisme demokrasi yang tidak menjamin adanya demokrasi sebenarnya (hakiki) karena terjadinya penyelewengan terhadap demokrasi itu sendiri (dalam hal ini adanya praktik Politik Uang merupakan wujud nyata dari Patronase yang terjadi diakibatkan adanya Klientelisme).

1.6. Operasionalisasi Konsep

- Hubungan Proses Pilkades

1. Botoh bersama dengan Kades melakukan hubungan klientelisme. Pada penelitian ini, yang dimaksud botoh adalah aktor penyedia materi

berupa uang dalam pendanaan pilkades. Botoh tersebut kemudian membentuk tim botoh.

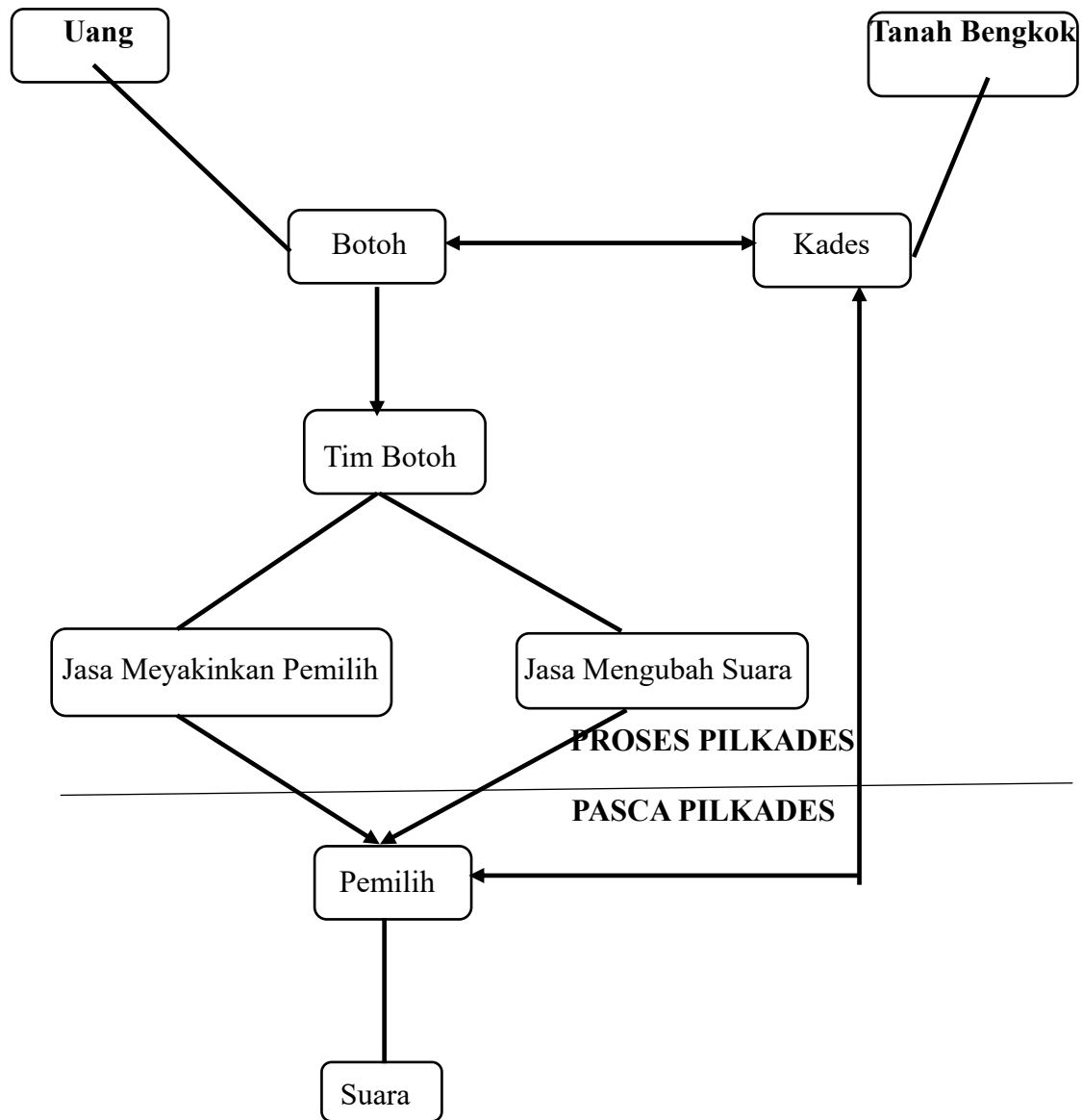
2. Tim botoh pada penelitian ini terdiri dari orang-orang yang dibentuk dalam rangka pemenangan Saryono. Tim Botoh tersebar di dua dusun yaitu Dusun Patemon dan Dusun Mloyo yang bekerja sebagai jasa untuk meyakinkan dan mengubah suara pemilih dengan membagikan uang kepada pemilih, sehingga terjadilah politik uang menjelang pilkades.
3. Pemilih pada penelitian ini merupakan orang yang mengikuti pilkades di Desa Dlimoyo Tahun 2020 yang kemudian diberi uang dari tim botoh untuk kemudian dapat memberikan suaranya kepada Kades yang bernama Saryono sebagai timbal balik dari uang yang telah diberikan sebelumnya oleh tim botoh.

- Hubungan Pasca Pilkades

1. Kades terpilih yaitu Saryono merupakan aktor Klien dari Botoh yang serta merta mengikuti perintah dari Botoh. Meskipun dalam hal ini Kades memiliki daya berupa tanah bengkok, tetapi pada intinya bahwa tanah bengkok tersebut berhasil didapatkan atas sumbangsih dari Botoh. Sehingga pemberian tanah bengkok dari Kades kepada Botoh merupakan keuntungan Patron dari Klien berupa (penyewaan tetap) kepada botoh (imbalan pendanaan pilkades)
2. Botoh pasca pilkades tetap berperan sebagai Patron dengan arti bahwa botoh merupakan orang maupun kelompok yang hanya menerima keuntungan yang diberikan oleh kades sebagai ganti modal pilkades

3. Pemilih pasca pilkades juga berperan sebagai sasaran pemberian materi oleh kades karena telah membantu pemenangannya

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



————— : Sumber daya yang dimiliki

↔ : Hubungan Klientelistik

————→ : Distribusi Uang



: Timbal Balik Suara dan pemberian materi kades ke

←-----

Pemilih

1.7. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

1.7.1. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen (Ratnaningtyas; 2023: 16), penelitian kualitatif adalah langkah dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta dapat mengetahui perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Sementara itu, Strauss dan Corbin (Cresswell; 1998: 24) menjelaskan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang pada awalnya penemuan tersebut tidak dapat dicapai dengan langkah-langkah statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Jenis penelitian ini bisa dipakai untuk meneliti tentang kehidupan sosial, sejarah, perilaku, dll. Pada hakikatnya pendekatan kualitatif senantiasa mengalami perkembangan dalam pengolahan dan data yang diteliti. Hal ini terjadi dari sifat kualitatif yang dinamis, yang menemukan persoalan-persoalan baru dalam proses analisis, sehingga penelitian terus mengalami perkembangan.

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif analitik. Menurut Sugiyono (2018: 3), metode deskriptif analitik merupakan metode penelitian untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna yang secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Metode ini secara langsung menyajikan hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk memberikan analisis subjek penelitian supaya menghasilkan data yang mendalam.

Pada intinya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Hal itu karena penelitian ini berusaha untuk menguraikan data riil yang telah ada di lapangan dan memeriksa kebenaran dari kasus yang terjadi yaitu “Hubungan Calon Kepala Desa dan Botoh dalam Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020” untuk kemudian dapat memperoleh kesimpulan dari keseluruhan data yang telah terkumpul.

1.7.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Menurut Sugiyono (2013), terdapat dua jenis data yang lazim digunakan dalam analisis penelitian. Dua jenis data tersebut adadalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013) sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.

Sumber data primer diperoleh dengan survey langsung ke lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data berupa wawancara yang ditujukan kepada informan penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) data Sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Data sekunder merupakan data yang di peroleh untuk menunjang keberadaan data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait “Hubungan Calon Kepala Desa dan Botoh dalam Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020”.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian. Hal itu karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data, maka metode yang digunakan pada pengumpulan data ini adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode atau pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis dapat mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat

memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian. Dalam teknik wawancara ini, penulis dapat mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi. Pelaksanaan metode wawancara diharapkan dapat menciptakan kondisi terarah dalam pengumpulan sumber sesuai dengan pedoman dalam melakukan wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dengan bantuan alat-alat yang dimiliki penulis. Dokumentasi dapat berupa bahan bacaan seperti buku tentang pilkades, hasil perolehan suara pilkades Dlimoyo Tahun 2020 yang terdapat di DINPERMADES Kab. Temanggung, foto struktur desa yang terdapat di laman BPS Kab. Temanggung, dan dokumen lainnya yang bertujuan meningkatkan keabsahan dari data yang diperoleh selama penelitian. Selain itu dokumentasi digunakan untuk membantu penulis dalam mengingat kembali sesuatu yang ditemukan saat wawancara di lapangan sesuai dengan waktu yang dilaksanakan.

1.7.4. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu botoh dari Kepala Desa Terpilih yang terdapat di beberapa dusun yang ada di Desa Dlimoyo yaitu Dusun Patemon dan Dusun Mloyo, empat Ketua RT Dusun Mloyo, tujuh Ketua RT Dusun Patemon, beberapa masyarakat yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2019 masyarakat, dan masyarakat petani yang terlibat dalam penyewaan tanah bengkok kepala desa. Informan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kepala Desa Dlimoyo terpilih pada Pilkades Tahun 2020,
- Botoh Calon Kepala Desa Dlimoyo yang terpilih (yang terdapat di Dusun Patemon dan Dusun Mloyo),
- Ketua RT 1-4 di Dusun Mloyo dan Ketua RT 1-7 di Dusun Patemon,
- Masyarakat desa di dua dusun yang melakukan sewa tanah bengkok kepala desa,
- Beberapa masyarakat yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020.

1.7.5. Validitas Data

Maxwell (1996; 87) mengatakan bahwa “validity is the correctness or credibility of a description, explanation, interpretation”, konsep tersebut menekankan bahwa validitas sebagai suatu ketepatan atau kredibilitas suatu deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan interpretasi hasil penelitian. Sedangkan Creswell & Miller (2013) mengatakan bahwa validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Maka dengan adanya pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa

validitas data merupakan instrument atau alat yang digunakan untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian sebagai uji kesahihan data yang dilakukan pada penelitian. Hal ini karena validitas didasarkan pada kepastian hasil penelitian yang akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum (Creswell; 2013: 286).

Penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul “Hubungan Calon Kepala Desa dan Botoh dalam Pilkades Dlimoyo Ngadirejo Temanggung Tahun 2020” merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Dimana pada hal ini, penulis akan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Triangulasi dalam mendapatkan validitas atau keabsahan data penelitian. Hal itu karena penelitian ini menggunakan sumber data dari berbagai informan yang berasal dari Kades, Botoh, Masyarakat, penggunaan dokumentasi berupa sumber buku dan referensi terkait, serta data dan lainnya yang menunjang pemberian informasi penelitian. Hal tersebut tentunya sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013), bahwa Triangulasi Data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.

Sugiyono (2017) membagi Triangulasi Data menjadi tiga jenis: 1). Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan melakukan pengecekan pada data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya, 2). Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan pengecekan pada data yang sama melalui Teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan dokumen,

arsip, dokumentasi, dan lainnya. 3). Triangulasi Waktu. Pemilihan waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data yang diperoleh. Maka dengan ini, dalam rangka mendapatkan data yang kredibel maka diperlukan pemilihan waktu yang tepat pada Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi.

1.7.6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data tersebut yaitu data reduction, data display, dan making conclusion. Penjelasan mengenai pengolahan dan analisis data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum serta memilih hal-hal pokok yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian setelah apa yang diperoleh dari aktivitas penelitian di lapangan. Setelah itu apabila dirasa data masih kurang valid, penulis akan segera mencari data kembali hingga menemukan jawaban.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melalui tahap reduksi data dan data yang diperoleh sudah memenuhi kriteria dan valid, maka langkah yang selanjutnya adalah data disajikan. Penyajian data dapat berupa table, grafik, bagan, maupun uraian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan lebih banyak menyajikan data dalam bentuk

tertulis dengan teks yang bersifat deskriptif analitik. Hal tersebut karena dengan metode kualitatif, maka proses penyajian data akan membutuhkan waktu dan jawaban yang panjang diakibatkan dari kebutuhan akan ketepatan dalam menyajikan data untuk mengupas sebuah fenomena sosial yang dinamis.

c. Penarikan Kesimpulan (making conclusion)

Setelah melalui dua tahap yaitu pengumpulan dan penyajian data, maka proses yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan makna pada hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Rumusan masalah dan kesimpulan ini diharapkan selaras, rumusan akan dapat berubah seiring berjalannya penelitian mengingat penelitian sosial kualitatif pasti akan berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif juga merupakan sebuah temuan baru yang belum ada sebelumnya yang dideskripsikan secara runtut sehingga setelah penelitian hubungan masalah dan teori menjadi lebih jelas.